

```
thn_awal . "-" . $data->thn_akhir . " " . $data->nm_instansi . ".doc"); ?>
```

Formulir 5
Evaluasi Pencapaian RPJPD Tahun 2005 - 2025
PROVINSI SUMATERA BARAT

Periode Perencanaan :	2005 - 2010
Arah Kebijakan :	<p>Arah kebijakan dalam periode Tahun 2005-2010 ini diharapkan adalah :</p> <p>A. PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA</p> <p>1. Terlaksananya Tata kehidupan Masyarakat Yang Agamais dan Budaya :</p> <p>a. Terlaksananya pencerahan pemahaman agama dan adat kepada para tokoh dan pemuka masyarakat.</p> <p>b. Semakin lengkapnya jumlah sarana peribadatan.</p> <p>2. Berkembangnya Sumatera Barat sebagai Pusat Pendidikan Yang Islami :</p> <p>a. Terlaksananya revitalisasi terhadap lembaga pendidikan agama, terutama pesantren.</p> <p>b. Terdapatnya landasan kuat bagi pendidikan bernuasa agama.</p> <p>3. Terwujudnya Kesalehan Sosial Berserta Kelembagaannya :</p> <p>a. Semakin optimalnya pengumpulan dan pemanfaatan, zakat, infak dan sadakah.</p> <p>b. Terlaksananya penerapan sistem perbankan syariah.</p> <p>4. Terwujudnya Sistem Pengelolaan Tanah Ulayat dengan Kepastian Hukum :</p> <p>a. Terlaksananya inventarisasi dan konsolidasi pemilik ulayat.</p> <p>b. Terlaksananya pemetaan tanah ulayat berikut pemiliknya.</p> <p>5. Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Susana Multikultur :</p> <p>a. Terlaksananya pendataan penduduk menurut etnis.</p> <p>b. Terlaksananya Pengkajian budaya dan tingkah laku etnis penduduk daerah.</p> <p>B. PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN</p> <p>1. Terbangunnya Sinergitas antara Pelaku Pembangunan</p>

- a. Terlaksananya keterpaduan program dan kegiatan antara SKPD yang telah ada.
 - b. Terbangunnya pola kerjasama yang baik antar kabupaten dan Kota.
2. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik, Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
- a. Terlaksananya pengembangan karir aparatur daerah dengan sistem merit
 - b. Terlaksananya reorganisasi birokrasi daerah sesuai kebijakan nasional
 - c. Terlaksananya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
3. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang berkeadilan dan Demokratis :
- a. Terlaksananya pembaharuan produk-produk hukum guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pembangunan
 - b. Terdapatnya transformasi budaya Minangkabau ke dalam produk hukum daerah
 - c. Terbangunnya kapasitas kelembagaan hukum Pemerintah Daerah
 - d. Terbangunnya kapasitas kelembagaan sosial dan adat.
 - e. Terlaksananya sistem pamantauan konflik sosial
4. Mewujudkan Aparatur yang Bersih dan Berwibawa :
- a. Terlaksananya perbaikan manajemen kepegawaian terutama rekrutmen, promosi, mutasi lewat sistem karier
 - b. Meningkatnya kualitas dan standar penyeleng-garaan diklat pegawai
 - c. Terlaksanaannya penataan struktur organisasi tata kerja pemerintahan daerah
 - d. Penataan dan pengelolaan dokumen/arsip daerah.
- C. PEMBANGUNAN EKONOMI**
1. Terlaksananya Usaha Pertanian Modern dan Agribisnis Maju.
- a. Terlaksananya secara penuh penyuluhan dan bimbingan teknis untuk usaha pertanian rakyat secara merata.
 - b. Berkembangannya 19 Balai Alih Teknologi Pertanian (BATP/Agro-Techno Park).
 - c. Terbangunnya 38 kawasan sentra produksi (KSP) komoditi unggulan yang tersebar merata pada 19 kabupaten/kota di Sumbar.
2. Termanfaatkannya Potensi Pertumbuhan Ekonomi dari Subsektor Perikanan Laut :

- a. Terbangunnya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional penangkapan.
- b. Dihasilkannya SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut.

3. Tercapainya Kegiatan Perdagangan dan Jasa Yang Mampu Bersaing :

- a. Semakin berkembangnya manajemen usaha bisnis jasa yang telah ada
- b. Terlaksananya Penataan lokasi Pasar dan pembangunan fasilitas terkait.

4. Terlaksananya Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional dan Internasional :

- a. Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui penyuluhan intensif.
- b. Terbangunnya pusat informasi wisata lengkap dengan fasilitas teknologi informasi

5. Terwujudnya Sumatera Barat Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pintu Gerbang Pantai Barat Sumatera :

- a. Terlaksananya perluasan dermaga Pelabuhan Teluk Bayur dan fasilitas pendukungnya
- b. Terdapatnya kualitas jalan raya dan sarana perhubungan menuju Pelabuhan Teluk Bayur
- c. Terlaksananya pengembangan Padang Industrial Park (PIP)

D. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Perbaikan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Alam :

- a. Penelitian/pengkajian dan pengembangan model pengelolaan pada 6 DAS dan implementasi pada sekurangnya 1 DAS

2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Penanganan Pencemaran Sumber Daya Alam (perdesaan dan perkotaan) :

- a. Pelaksanaan kajian untuk pemantapan pengelolaan kawasan konservasi dan lindung dengan melibatkan masyarakat nagari setempat (dengan prinsip co management) dan penanganan pencemaran
- b. Pengembangan model konservasi berbasis nagari dengan pendekatan agroforestri
- c. Implementasi pada 20% kawasan konservasi, kawasan lindung dan nagari

3. Pengembangan Hutan Rakyat Tanaman Industri :

- a. Pelaksanaan kajian pengembangan hutan rakyat tanaman industri dan pelaksanaan pada 36 nagari (3 nagari per

kabupaten)

4. Pengembangan Kerangka Peraturan untuk Mendukung Implementasi :

- a. Pengembangan kerangka aturan sebagai landasan implementasi pada kegiatan prioritas pada RPJMD ke 1

E. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN SUMBERDAYA MANUSIA

1. Tercapainya Kualitas Pendidikan Yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama

- a. 90 % guru dan 75 % dosen kompeten seluruh jenjang pendidikan dan seluruh sekolah terakreditasi
b. Tersedia lab ilmu dasar: matematika, fisika, kimia dan biologi dan guru Tersedia
c. Selesainya fokus Sekolah Kejuruan
d. Rintisan 5 Sekolah Berasrama

2. Terdapatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Yang Tinggi :

- a. Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan Dasar
b. Konsolidasi dan persiapan fokus rumah sakit per daerah siap serta informasi dan pemetaan keperluan tenaga medis dan manajemen kesehatan

3. Tercapainya Kemampuan IPTEKS Yang Maju dan Tepat Guna :

- a. Pemetaan produk-produk baru dan perkembangan kebutuhan masyarakat
b. Pendirian lembaga dan sistem pengembangan teknologi dan inovasi

F. PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Terlaksananya Panataan Ruang Yang Baik dan Dilaksanakan Secara Konsekuen :

- a. Selesainya penyusunan RTRW Provinsi Sumbar serta kabupaten dan kota lainnya
b. Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai prioritas pembangunan.

2. Terdapatnya Perlindungan Terhadap Kawasan Konservasi Alam :

- a. Terlaksananya penetapan patok yang jelas serta inventarisasi lahan flora dan fauna serta lahan Kritis
b. Terlaksananya penertiban penebangan hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi

	<div>3. Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Yang Baik :<div>a. Terlaksananya pengembangan sarana dan manajemen BAPEDALDA</div><div>b. Tersusunnya Perda lebih operasional untuk pengelolaan lingkungan hidup.</div></div> <div>4. Terbinanya Masyarakat Sadar Lingkungan :<div>a. Berkembangnya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan</div><div>b. Mantapnya sistem tanggap darurat dan penanganan bencana alam</div></div>
Uraian Pencapaian	<div>: Pencapaian hasil pelaksanaan rencana dalam periode Tahun 2005-2010 ini adalah :</div> <div>A. PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA</div> <div>Pencapaian dari arah kebijakan Pembangunan Agama dan Budaya di Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan dengan beberapa data capaian yaitu :</div> <div>1. Jumlah jemaah Haji Provinsi Sumatera Barat yang relatif konstan di angka 4.000 an orang. Jumlah jemaah haji dari Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2005 berjumlah 4.643 orang, Tahun 2006 berjumlah 4.444 orang, Tahun 2007 berjumlah 4.323 orang dan terakhir pada tahun 2010 jumlah jemaah haji menjadi 4.608 orang.</div> <div>2. Perkembangan jumlah ternak qurban di Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil kecuali pada tahun 2007 dan 2009. Pada Tahun 2005 jumlah ternak qurban di Sumatera Barat sebanyak 113.698, pada Tahun 2006 berjumlah 156.446, pada Tahun 2007 turun menjadi 151.151, pada Tahun 2008 meningkat menjadi 172.193, Tahun 2009 menjadi 158.318 dan Tahun 2010 menjadi 190.457.</div> <div>3. Perkembangan jumlah orang yang melaksanakan ibadah qurban mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2005 (95.238 orang), Tahun 2006 (268.808 orang) dan Tahun 2007 (273.687 orang) sedangkan pada Tahun 2008 (151.667 orang), Tahun 2009 (153.063 orang), dan Tahun 2010 (185.939 orang) mengalami penurunan.</div> <div>B. PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN</div> <div>1. dari aspek hukum, yang menjadi perhatian dalam dokumen RPJPD juga menjadi bahasan dalam RPJMD 2006-2010. Misalnya, terkait dengan masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam RPJMD itu disebutkan belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan di SKPD, karena masih lemahnya koordinasi diantara lembaga pengawas dengan</div>

penegak hukum, kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap pemberantasan KKN, produk hukum daerah yang belum aspiratif dan memberi perlindungan HAM kepada masyarakat.

2. rendahnya kualitas aparatur sipil negara sehingga berdampak pada layanan publik yang disediakan

C. PEMBANGUNAN EKONOMI

- realisasi PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 memperlihatkan lebih rendah dari diprediksi atau yang ditargetkan yaitu Tahun 2010 target 40,70 dengan realisasi 38,86.

- Realisasi investasi total juga memperlihatkan lebih rendah dari yang diprediksi Tahun 2005 target 9,5 dengan realisasi 8,05.

- peranan sektor industri pengolahan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian Sumatera Barat masih relatif kecil bahkan terjadi apa yang disebut dengan deindustrialisasi

- Realisasi pendapatan per kapita juga memperlihatkan lebih rendah dari yang diprediksi pada Tahun 2010 dengan target 8,50 dengan realisasi 7,33.

D. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

- Capaian Prediksi Pembangunan SDA Dan Lingkungan Hidup :

Perbaikan Sistem Pengelolaan, sebagai berikut :

1. Penakanan/perhatian yaitu Penetapan Tata Ruang Wilayah, kondisi awal sudah ditetapkan kondisi saat ini yaitu Diperbaharui tahun 2012.

2. Penakanan/perhatian Pengembangan model pengelolaan terpadu sumber daya alam kondisi awal Belum ada, Kondisi saat ini Belum ada

3. Penakanan/perhatian yaitu Penyusunan Produk Hukum untuk pelaksanaan Pengelolaan terpadu SDA kondisi awal Belum ada Kondisi saat ini Belum ada

E. PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA

- Pencapaian masih belum optimal dimana IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 baru mencapai 67.25, penurunan angka IPM ini karena adanya perbedaan pengukuran IPM, dari metode yang lama menjadi metode yang baru

Bidang Pendidikan :

- Pencapaian Harapan Lama Sekolah Dan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat yaitu Harapan Lama Sekolah (Tahun) pada Tahun 2010 sebesar 12,22 % dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) pada Tahun 2010 sebesar 8,13%.

Bidang Kesehatan

- Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kesehatan di Sumatera Barat yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) pada Tahun 2010 sebesar 67,59%, Angka Kematian Ibu Melahirkan (PER 100.000 KH) sebesar 207, Angka Kematian Bayi (PER 1000 KH) sebesar 28, Angka Gizi Kurang (BB/TB) (pada Balita) % sebesar 8,20, Akses Air Minum yang berkualitas (%) sebesar 46,68, Kasus baru Tuberculosis (%) sebesar 57,05 %, Kasus Malaria (Annual Paracite Index-API)/1000 pd sebesar 0,24, ODHA yang diobati (%) sebesar 100, Cakupan imunisasi bayi usia 0-11 bulan (%) sebesar 95,60, Penduduk menggunakan Jamban Sehat (%) sebesar 61,49 %, Jaminan pemeliharaan kesehatan (%) sebesar 50,08%, Bed Occupation Rate (BOR) sebesar 65,1 %

F. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Perkembangan Beberapa Indikator Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 dan 2010

- Kondisi Jalan Nasional Mantap (%) pada tahun 2005 sebesar 84,28% sedangkan pada tahun 2010 sebesar 51,07%
- Kondisi Jalan Provinsi Mantap (%) pada tahun 2005 sebesar 80,92 % sedangkan pada tahun 2010 sebesar 85,97 %
- Panjang Jembatan (Nasional+provinsi) Km pada tahun 2005 sepanjang 22.307,0 km sedangkan pada tahun 2010 sepanjang 31.825,50 km
- Jumlah jembatan (Nasional+provinsi) pada tahun 2005 sebanyak 1.232.0 sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 1.685.0
- Rasio Elektrifikasi (%) pada tahun 2010 sebesar 69,50%
- Cakupan Layanan Listrik (%) pada tahun 2010 sebesar 90,0 %
- Jumlah RT Pelanggan Air Minum pada tahun 2005 sebanyak 32.417 sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 36.914.

G. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Capaian prediksi pembangunan daerah bidang tata ruang dan pengembangan wilayah dalam RPJPD Sumatera Barat tahun 2005-2025 dapat diawali dengan melihat prediksi pembangunan tata ruang dan pembangunan wilayah itu sendiri dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

- Untuk tetap mempertahankan kawasan suaka alam berupa cagar alam dan kawasan pelestarian alam, ternyata juga

	<p>sudah mulai mengalami pengurangan. Pada RPJMD I (2005-2010), pengurangan kawasan suaka alam paling besar terjadi pada Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang dan Kota Padang Panjang</p> <p>- Pengurangan luasan hutan lindung pada RPJMD I 2005-2010 paling besar terdapat pada Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar</p> <p>- pada pelaksanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah di RPJMD ke dua 2010-2015 realisasinya belum terjadi perubahan yang bersifat dinamis, mulai dari Kota Padang sebagai PKN belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagai PKN</p>
Periode Perencanaan :	2011 - 2015
Arah Kebijakan :	<p>A. PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA</p> <p>I. Terlaksananya Tata kehidupan Masyarakat Yang Agamais dan Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pencerahan agama dan adat untuk mubaligh dan tokoh agama 2. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan <p>II. Berkembangnya Sumatera Barat Sebagai Pusat Pendidikan Yang Islami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya sekolah Berasrama (Boarding School) pada setiap kabupaten dan kota 2. Terdapatnya manajemen sekolah bernuansa Islam <p>III. Terwujudnya Kesalehan Sosial Berserta Kelembagaannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesalehan sosial 2. Semakin mantapnya penerapan perbankan syariah. <p>IV. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah ulayat Dengan Kepastian Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kesepakatan KAN seluruh kabupaten dan kota tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat 2. Tersusunnya Perda Tanah Ulayat yang disepakati oleh KAN dan Lembaga Kerapatan Adat. <p>V. Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Susana Multikultur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penyuluhan budaya multikultur 2. Terlaksananya Kampanye dan pelaksanaan kerukunan sosial

B. PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN**I. Terbangunnya Sinergitas Antara pelaku Pembangunan**

1. Meningkatkan koordinasi pengelolaan program antar SKPD
2. Terwujudnya tata-kelola kerjasama antar kabupaten dan kota

II. Terwujudnya tata pemerintahan Yang Baik, Partisipatif, transparan dan Akuntabel

1. Mantapnya sistem pengembangan karir aparatur dengan sistem merit
2. Terwujudnya kualitas aparatur yang lebih profesional
3. Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran partisipatif

III. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang berkeadilan dan Demokratis

1. Melakukan pembangunan struktur dan kelembagaan hukum daerah
2. Melakukan pendidikan dasar hukum bagi fungsionaris adat
3. Pemantapan sistem pemantauan konflik sosial dan kerawanan politik
4. Melanjutkan penyuluhan sadar hukum
5. Pemantapan pelaksanaan sistem pemantauan konflik

IV. Mewujudkan aparatur yang Bersih dan Berwibawa

1. Penataan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan
2. Meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui sistem penggajian pegawai
3. Penyempurnaan SOTK yang efektif, ramping dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan
4. Terbangunnya suatu sistem data-base yang lengkap dan mudah diakses

C. PEMBANGUNAN EKONOMI**I. Terlaksananya Usaha Pertanian Modern dan Agribisnis Maju**

1. Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha pertanian rakyat melalui penyuluhan dan bimbingan teknis.
2. Terkembangkannya 38 Balai Alih Teknologi Pertanian (BATP/Agro-Techno Park).
3. Terbangunnya 76 KSP, 38 KIMBUN, 19 KAPET dan 5 Agro-city.
4. Terbangunnya 1 Science/ Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.

II. Termanfaatkannya potensi pertumbuhan ekonomi dari subsektor perikanan laut.

1. Terselesaikannya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional penangkapan.
2. Berlanjutnya proses menghasilkan SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut.
3. Tumbuhkannya kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan.

III. Tercapainya Kegiatan Perdagangan dan Jasa Yang Mampu Bersaing

1. Meningkatnya kemampuan kewirausahaan yang bersifat profesional.
2. Terwujudnya kegiatan UMKM dan Koperasi yang profesional

IV. Terlaksananya Sumatera Barat Sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional dan Internasional

1. Terlaksananya pemugaran dan pengembangan objek- objek wisata utama
2. Terdapatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan menuju objek wisata

V. Terwujudnya Sumatera Barat Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pintu Gerbang Pantai Barat Sumatera

1. Terdapatnya fasilitas pendukung pelabuhan Teluk Bayur yang memenuhi standard
2. Terdapatnya kualitas SDM pengelola pelabuhan Teluk Bayur dan BIM yang profesional
3. Terlaksananya Perpanjangan landasan pacu BIM dan fasilitas bandara terkait

D. PEMBANGUNAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam

1. Implementasi pada 3 DAS dan pemantapan pada DAS yang sudah dilaksanakan

II. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan penanganan pencemaran sumberdaya alam (perdesaan dan perkotaan)

1. Peningkatan pengelolaan pada kawasan konservasi/lindung dan agroforestry berbasis nagari pada kawasan dan nagari prioritas dalam konteks ekowisata

III. Pengembangan hutan rakyat tanaman industri

1. Peningkatan jumlah nagari yang dapat melaksanakan hutan rakyat tanaman industri dan pemantapan pengelolaan

pada nagari- nagari yang sudah dilaksanakan sebelumnya

IV. Pengembangan kerangka peraturan untuk mendukung implmentasi

1. Pengembangan kerangka aturan sebagai landasan implementasi pada kegiatan prioritas pada RPJMD ke 2 (mana yang masih diperlukan)

E. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN SUMBERDAYA MANUSIA

I. Tercapainya Kualitas Pendidikan Yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama

1. Penyelesaian manajemen eksternal
2. Tercapainya target MDG pemerataan IPM 99%
3. Kurikulum agama terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran
4. Terwujudnya Sekolah Kejuruan standar nasional
5. Lanjutan 8 Sekolah berasrama, dan 2 Mulai Standar Nasional

II. Terdapatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Yang Tinggi

1. Penuntasan sebagian Penyakit utama
2. 4 Rumah Sakit Umum menjadi rujukan Sumatera Bagian Tengah (Stroke, Psikotropika, Ginjal, Ortopedi)

III. Tercapainya Kemampuan IPTEKS Yang Maju dan Tepat Guna

1. Memilih dan mendesign pilihan teknologi tepat untuk mendorong pembangunan
2. Membangun Sains Park untuk pengembangan IPTEKS

F. PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Terlaksananya Ruang Yang Dilaksanakan Konsekuen Panataan Baik dan Secara konsekuen

1. Terlaksananya penerapan dokumen RTRW secara tegas dan konsekuen
2. Selesaiannya Penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai prioritas daerah

II. Terdapatnya Perlindungan Terhadap Kawasan Konsevasi Alam

1. Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengawasan terhadap Kawasan Konservasi Alam
2. Terwujudnya penetapan Perda sangsi keras bagi pelanggaran Kawasan Konservasi Alam

	<p>III. Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Yang Baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya standard baku mutu air dan udara bagi industri 2. Terwujudnya pengawasan penggunaan lahan kritis <p>IV. Terbinanya Masyarakat Sadar Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan 2. Terdapatnya penggunaan peralatan maju pada sistem tanggap darurat
Uraian Pencapaian	<p>: Pencapaian hasil pelaksanaan rencana dalam periode Tahun 2011 - 2015 ini adalah :</p> <p>A. PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pencerahan agama dan adat untuk mubaligh dan tokoh agama Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama, program peningkatan pendidikan agama dan keagamaan dan program pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan telah menunjang capaian indikator kinerja persentase peningkatan zakat/wakaf/infak/sedekah yang disalurkan melalui badan amil zakat/wakaf/infak/sedekah resmi. 2. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan Pada tahun 2005, tercatat sebanyak 4.492 buah masjid dan sebanyak 10.492 buah mushalla di Sumatera Barat. Pada tahun 2015, jumlah tersebut meningkat menjadi 4.854 buah masjid dan 12.370 mushalla. Demikian juga sarana prasarana peribadatan agama lain pada umumnya (BPS, SBDA, 2015-2015). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan sarana prasarana untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan peribadatan menurut agama masing-masing mengalami perkembangan cukup baik. 3. Terbangunnya sekolah Berasrama (Boarding School) pada setiap kabupaten dan kota perkembangan lembaga pendidikan keagamaan dari segi kuantitas dalam sepuluh tahun menunjukkan gejala kenaikan yang cukup tinggi. Jumlah madrasah ibtidaiyah negeri dan swasta pada tahun 2005 berjumlah 111 buah, meningkat menjadi 137 buah di tahun 2015. Jumlah madrasah tsanawiyah negeri dan swasta pada tahun 2005 berjumlah 358 buah, meningkat menjadi 400 buah di tahun 2015. Jumlah madrasah aliyah negeri dan swasta pada tahun 2005 berjumlah 161 buah, meningkat menjadi 208 buah di tahun 2015. Namun, menurut data BPS , jumlah pondok

pesantren di Sumatera Barat menurun dari 250 buah pada tahun 2007 menjadi 212 pada tahun 2015. Hal ini bisa terjadi karena memang pesantren tersebut tutup dan sebagian karena proses penegerian.

4 Terdapatnya manajemen sekolah bernuansa islam

5. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kesalehan sosial

Berdasarkan data BPS, kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat terus meningkat. Meskipun dilihat dari data pertahun terdapat angka-angka yang fluktuatif, tetapi jika dilihat gejala dalam sepuluh tahun, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2005, zakat yang dikumpulkan lembaga resmi tercatat Rp 967.237.000. Sedangkan pada tahun 2015, angka tersebut melonjak mencapai Rp 130.816.300.131. Berarti terjadi kenaikan mencapai 1.352% (135 kali lipat) dalam masa sepuluh tahun

6. Semakin mantapnya penerapan perbankan syariah

Terkait perkembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat, market share perbankan syariah di Sumbar lebih tinggi dari nasional, yakni sekitar 6,8 persen. Meskipun angka ini melampaui angka rata-rata nasional, namun masih jauh dari prediksi yang mematok market share mencapai 20% pada tahun 2015. Sampai Desember 2015, di Sumatera Barat baru berdiri dan beroperasi 10 kantor cabang syariah, 36 kantor cabang pembantu syariah, dan 6 kantor kas syariah, serta 7 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Sumber: Statistik Perbankan Syariah [SPS], Otoritas Jasa Keuangan [OJK], April dan Desember 2015)

7. Terlaksananya kesepakatan KAN seluruh kabupaten dan kota tentang sistem pemanfaatan tanah ulayat

Perda No.16 Tahun 2008 memberikan pengakuan atas tanah ulayat dalam empat macam, yakni tanah ulayat nagari yang penguasaannya berada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pengaturan pemanfaatannya berada pada Pemerintahan Nagari, tanah ulayat suku yang penguasaannya dan pemanfaatannya berada pada penghulu-penghulu suku, tanah ulayat kaum yang penguasaannya dan pemanfaatannya berada pada ninik mamak jurai/mamak kepala waris, dan tanah ulayat rajo yang penguasaannya dan pemanfaatannya berada pada anak laki-laki tertua menurut garis keturunan ibu.

8. Tersusunnya Perda Tanah Ulayat yang disepakati oleh KAN dan Lembaga Kerapatan Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Pemanfaatannya yang mulai

berlaku tanggal 1 Juli 2008

9. Terlaksananya Penyuluhan budaya multikultur

Dibentuknya Forum-forum Kerukunan umat beragama (FKUB), Kominda dan Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial di daerah yang bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan Bundo kanduang dalam menyikapi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat

10. Terlaksananya Kampanye dan pelaksanaan kerukunan sosial

Keberhasilan tercapainya tujuan ini tahun 2015, dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja Jumlah konflik dalam masyarakat bernuansa SARA sebesar 0 konflik. Hal ini mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat Sumatera Barat selama tahun 2015 telah harmonis walaupun agamanya berbeda-beda.

- Pada tahun 2005, tercatat sebanyak 4.492 buah masjid dan sebanyak 10.492 buah mushalla di Sumatera Barat.
- Pada tahun 2015, jumlah tersebut meningkat menjadi 4.854 buah masjid dan 12.370 mushalla. Demikian juga sarana prasarana peribadatan agama lain pada umumnya (BPS, SBDA, 2015-2015)
- Jumlah jamaah haji Sumatera Barat bergerak relatif konstan di angka 4.000-an. Kecuali pada tahun 2015 yang menunjukkan penurunan ke angka 3.000-an, gejala ini lebih disebabkan pembatasan dan pengurangan kuota haji akibat renovasi dan pembangunan Masjid al-Haram oleh pemerintah Arab Saudi

B. PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN

1. upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Sumatera Barat. Kedua, dalam RPJMD 2010-2015 dinyatakan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional sebagai misi yang harus diimplementasikan dalam pembangunan yang dilaksanakan. Ketiga, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penganggaran pembangunan dan terwujudnya budaya sadar hukum dan tata hukum di masyarakat.

2 upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi adalah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera

Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Sumatera Barat. Kedua, dalam RPJMD 2010-2015 dinyatakan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional sebagai misi yang harus diimplementasikan dalam pembangunan yang dilaksanakan. Ketiga, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penganggaran pembangunan dan terwujudnya budaya sadar hukum dan tata hukum di masyarakat. Sementara di aspek lain, agar kualitas pelayanan publik meningkat, maka dalam RPJMD tersebut dikembangkan strategi mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu serta meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Terwujudnya kualitas aparatur yang lebih profesional

indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN ditetapkan rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat.

Realisasi rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat tahun 2014-2015 sebesar 5,44 Jpl pada tahun 2014 dan sebesar 7,60 Jpl pada tahun 2015. Jenis diklat yang diikuti terdiri dari Diklat Pim, Diklat Teknis, dan dan Diklat Fungsional.

Dari evaluasi indikator kinerja rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat di atas, telah menjelaskan bahwa rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat menunjukkan peningkatan dari 5,44 JPL tahun 2014 menjadi 7,60 JPL tahun 2015.

4. Penataan kompetensi SDM aparatur sesuai dengan kebutuhan

indikator kinerja rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat menunjukkan trend peningkatan dengan peningkatan masing-masing sebesar 2,16. Demikian juga hal capaian indikator kinerjanya juga menunjuk trend meningkat seiring dengan peningkatan realisasi kinerja.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat 7,6 Jpl merupakan realisasi tahun ke 5 dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015. Dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 4 Jpl, realisasi indikator kinerja telah di atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat sebesar 190% termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan diklat aparatur daerah sesuai dengan kebutuhan.

5. Penyempurnaan SOTK yang efektif, ramping dan berorientasi pada kebutuhan pelayanan

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Sumatera Barat

C. PEMBANGUNAN EKONOMI

1. Realisasi PDRB Provinsi Sumatera Barat berdasarkan harga berlaku untuk tahun 2005, 2010 dan 2015 lebih tinggi dari prediksi yang dikemukakan dalam RPJP Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Artinya capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat telah dapat melampaui prediksi yang telah ditetapkan.

2. realisasi PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 memperlihatkan lebih rendah dari diprediksi atau yang ditargetkan. Hal ini terkait dengan laju inflasi yang relatif tinggi pada tahun 2005 dan 2010. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.3.1, realisasi laju inflasi tahun 2005 dan 2010 lebih tinggi dari yang diprediksi. Oleh sebab itu rendahnya realisasi PDRB berdasarkan harga konstan dibandingkan dengan prediksi disebabkan oleh laju inflasi inflasi yang relatif tinggi.

3. peranan ekonomi Sumatera Barat masih kecil dalam perekonomian nasional dan peranan tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti selama 15 tahun terakhir. Pada tahun 2005 kontribusi PDRB Sumatera Barat terhadap PDB nasional hanya sekitar 1,5 % dan mengalami kenaikan sedikit pada tahun 2015 menjadi 1,56 %.

4. Selama periode 2005-2009 dan 2010-2015 pertumbuhan ekonomi nasional tidak ada yang lebih dari 6,5 %.

Sumatera Barat tidak mempunyai keunggulan yang melebihi dari daerah lain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tidak mungkin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi prediksi yang terdapat dalam RPJPD Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

1. Meningkatnya kualitas SDM pelaku usaha pertanian rakyat melalui penyuluhan dan bimbingan teknis.

2. Terkembangkannya 38 Balai Alih Teknologi Pertanian (BATP/Agro-Techno Park).

3. Terbangunnya 76 KSP, 38 KIMBUN, 19 KAPET dan 5 Agro-city.

program pengembangan kawasan sentra produksi pertanian (KSP) hortikultura dari 20 menjadi 28 pada tahun kelima (2015). Namun ketercapaiannya seperti dicantumkan dalam indikator kinerja daerah untuk RPJMD 2016-2021 telah mencapai 60 KSP

4. Terbangunnya 1 Science/ Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.
 5. terselesaikannya prasarana dan sarana penangkapan, pendaratan dan pendukung operasional penangkapan.
 6. Berlanjutnya proses menghasilkan SDM yg handal utk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut.
 7. Terkembangkannya kelembagaan usaha bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan.
- Realisasi indikator kinerja persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan sebesar 0,24% merupakan realisasi tahun ke 5 dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan target sebesar 4%, jelas terlihat realisasi indikator kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan.
8. Meningkatnya kemam-puan kewirausahaan yang bersifat profesional.
 9. Terwujudnya kegiatan UMKM dan Koperasi yang profesional
- Kondisi UMKM tahun 2014-2015 telah menunjukkan adanya pengembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan UMKM tahun 2014 sebesar 4,02% dan meningkat menjadi 9,65 pada tahun 2015. Kondisi Koperasi juga menunjukkan adanya pertumbuhan. Hal ini dilihat dari indikator persentase peningkatan volume usaha koperasi dari tahun 2011-2015. Dilihat dari trend persentase pertumbuhan tahun 2012-2015 menunjukan trend berfluktuasi dan cenderung menurun. Persentase peningkatan volume usaha koperasi tahun 2011 tumbuh sebesar 29,65% turun menjadi 14,80% tahun 2012, turun menjadi 1,13% tahun 2103 dan naik menjadi 20,37% tahun 2014 serta turun kembali menjadi 10,93% tahun 2015. Secara rata-rata selama 5 (lima) tahun menunjukan kenaikan sebesar 15,38 %.
10. Terlaksananya pemugaran dan pengembangan objek- objek wisata utama
 11. Terdapatnya kualitas prasarana dan sarana perhubungan menuju objek wisata
 - 12.Terdapatnya fasilitas pendukung pelabuhan Teluk Bayur yang memenuhi standard
 13. Terdapatnya kualitas SDM pengelola pelabuhan Teluk Bayur dan BIM yang profesional
 - 14.Terlaksananya Perpanjangan landasan pacu BIM dan fasilitas bandara terkait

D.PEMBANGUNAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Implementasi pada 3 DAS dan pemantapan pada DAS yang sudah dilaksanakan

Perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam yang pada periode ke1 RPJMD harus diawali dengan pengkajian/pengembangan model pada 6 DAS belum terlaksana dan belum diimplementasikan pada 1 (satu) DAS. Pada periode kedua lanjutan implementasi ini pada DAS yang lain tentu juga belum dilakukan karena memang riset belum dilakukan

2. Peningkatan pengelolaan pada kawasan konservasi/lindung dan agroforestry berbasis nagari pada kawasan dan nagari prioritas dalam konteks ekowisata telah dilakukan identifikasi jasa lingkungan untuk ekowisata di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Lima Puluh Kota tetapi implementasi pengelolaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas kawasan lindung belum terlaksana. Dengan demikian sukar mencapai target untuk meningkatkan jumlah kawasan lindung yang dikelola dengan baik dan pelaksanaan agroforestri disejumlah nagari seperti yang ingin diwujudkan sampai periode ke-4 (keempat) RPJP ini.

3. Peningkatan jumlah nagari yang dapat melaksanakan hutan rakyat tanaman industri dan pemantapan pengelolaan pada nagari- nagari yang sudah dilaksanakan sebelumnya pengembangan agroforestri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat . Hal ini telah dijalankan pada beberapa lokasi seperti di Hutan Nagari Paru (Kabupaten Sijunjung) dan Hutan Nagari Pakan Rabaa (Kabupaten Solok Selatan). Khusus untuk pemanfaatan jasa rosot karbon telah berlangsung kerja sama antara Co2 Bv Belanda dengan nagari Simarasok dan Kamang Magek (Kabupaten Agam). pengembangan hutan rakyat tanaman industri. Hutan industri ini belum memperlihatkan perkembangan yang berarti kecuali pada Kabupaten Solok Selatan.

4. Pengembangan kerangka aturan sebagai landasan implementasi pada kegiatan prioritas pada RPJMD ke 2 (mana yang masih diperlukan)

E. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN SUMBERDAYA MANUSIA

1. Penyelesaian manajemen eksternal

2. Tercapainya target MDG pemerataan IPM 99%

IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 baru mencapai 67.25 dan tahun 2015 sebesar 69.98. Kesenjangan atau

gap antara prediksi dengan capaian pada tahun 2010 sebesar 2.95 dan semakin membesar 4.72. Bila dibandingkan provinsi di seluruh Indonesia, ranking Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ranking ke-9 pada tahun 2010 di antara 33 provinsi dan tahun 2015 masih bertahan di ranking ke-9 pada 34 Provinsi

3. Kurikulum agama terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran
4. Terwujudnya Sekolah Kejuruan standar nasional
5. Lanjutan 8 Sekolah berasrama, dan 2 Mulai Standar Nasional
6. Penuntasan sebagian Penyakit utama
7. 4 Rumah Sakit Umum menjadi rujukan Sumatera Bagian Tengah (Stroke, Psikotropika, Ginjal, Ortopedi)
8. Memilih dan mendesign pilihan teknologi tepat untuk mendorong pembangunan
9. Membangunan Sains Park untuk pengembangan IPTEKS

F. PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Terlaksananya penerapan dokumen RTRW secara tegas dan konsekuen
2. Selesainya Penyusunan Rencana Induk Sektoral sesuai prioritas daerah
3. Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengawasan terhadap Kawasan Konservasi Alam
4. Terwujudnya penetapan Perda sangsi keras bagi pelanggaran Kawasan Konservasi Alam
5. Tersusunnya standard baku mutu air dan udara bagi industri

Indikator tingkat pencemaran lingkungan hidup sub indikator air tahun 2015 target 58 Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data hasil pemantauan kualitas air sungai yang dilakukan pada 4 (empat) sungai yang menjadi target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup untuk Provinsi Sumatera Barat yaitu Sungai Batang Agam, Batang Pangian, Batang Ombilin, dan Batang Anai.

6. Terwujudnya pengawasan penggunaan lahan kritis

Realisasi indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis tahun 2015 sebesar 2,58% adalah realisasi tahun ke-5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 dengan target 2,68 %, jelas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator ini tahun 2015 di bawah target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja persentase penurunan lahan kritis tahun 2015 sebesar 96,27% termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik. Keberhasilan ini dicapai disebabkan oleh adanya penanaman pohon pada hutan yang tersebar pada Kabupaten/Kota se Sumatera Barat seluas 9.616 Ha yang dilaksanakan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, pihak swasta, dan SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Instansi Pemerintah Pusat

	<ul style="list-style-type: none"> 7. Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan 8. Terdapatnya penggunaan peralatan maju pada sistem tanggap darurat
Periode Perencanaan :	2016 - 2020
Arah Kebijakan :	<ul style="list-style-type: none"> A. Pembangunan Agama dan Budaya <ul style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Tata kehidupan Masyarakat Yang Agamais dan Budaya <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pencerahan agama dan adat untuk masyarakat umum b. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan 2. Berkembangnya Sumatera Barat Sebagai Pusat Pendidikan Yang Islami <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Jumlah dan kualitas sekolah berasrama (Boarding School) b. Terwujudnya kualitas manajemen sekolah bernuansa Islam 3. Terwujudnya Kesalehan Sosial Berserta Kelembagaannya <ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya wadah tunggal pengelola zakat, wakaf dan infak b. Terlaksananya penerapan Sistem Ekonomi Islam 4. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah ulayat Dengan Kepastian Hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya pemanfaatan yang berlandaskan sistem yang telah diatur dalam Perda Tanah Ulayat b. Terlaksananya Pengamanan atas pemanfaatan tanah ulayat. 5. Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam Susana Multikultur <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapatnya sistem dampak gejolak social b. Terwujudnya komunikasi intensif antar etnis B. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya Sinergitas Antara pelaku Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> a. Mantapnya koordinasi pelaksana an program SKPD b. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD serta kabupaten dan kota 2. Terwujudnya tata pemerintahan Yang Baik, Partisipatif, transparan dan Akuntabel <ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya aparatur yang bersih dan bebas KKN b. Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi c. Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan 3. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang berkeadilan dan Demokratis <ul style="list-style-type: none"> a. Memantapkan sistem pemantau kerawanan konflik politik

- b. Meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat
- c. Melaksanakan penyuluhan hukum dan hak azasi manusia
- d. Penguatan kelembagaan sosial dan adat
- e. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat
- 4. Mewujudkan aparatur yang Bersih dan Berwibawa
 - a. Melanjutkan pembenahan manajemen pegawai sebelumnya
 - b. Pendayagunaan aparatur yang makin efisien dan efektif
 - c. Pemantapan kinerja SOTK dalam setiap lini birokrasi Pemda
 - d. Pemanfaatan sistem data base untuk tujuan internal dan eksternal birokrasi
- C. Pembangunan Ekonomi
 - 1. Terlaksananya Usaha Pertanian Modern dan Agribisnis Maju
 - a. Diterapkannya teknologi pertanian tepat guna pada 190 nagari/desa dengan didukung oleh 76 Balai Alih Teknologi Pertanian.
 - b. Terbangunnya 190 KSP, 76 KIMBUN, dan 38 KAPET dan 10 Agrociti.
 - c. Meningkatkan peran Science/Technopark dlm pengembangan produk inovatif .
 - 2. Termanfaatkannya potensi pertumbuhan ekonomi dari subsektor perikanan laut
 - a. Terkembangkannya kelembagaan usaha/bisnis penangkapan dan budidaya ikan laut dengan pola kemitraan pemerintah dan swasta dan intensifikasi penangkapan dan budidaya.
 - b. Dihasilkannya SDM yang handal untuk mendukung usaha penangkapan dan budidaya ikan laut
 - 3. Tercapainya Kegiatan Perdagangan dan Jasa Yang Mampu Bersaing
 - a. Terwujudnya kemampuan penggunaan teknologi Informasi Yang Tinggi
 - b. Terwujudnya manajemen usaha jasa modern dan profesional
 - 4. Terlaksananya Sumatera Barat Sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional dan Internasional
 - a. Terwujudnya penggunaan teknologi maju dalam pengelo-laan pariwisata
 - b. Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pemandu dan pengelola wisata
 - 5. Terwujudnya Sumatera Barat Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pintu Gerbang Pantai Barat Sumatera
 - a. Terdapatnya Teknologi muat bongkar Modern pada pelabuhan Teluk Bayur
 - b. Terbangunnya dok kapal samudra menggunakan teknologi modern
 - c. Terdapatnya fasilitas terminal penumpang Bandara BIM yang modern dengan standard internasional
- D. Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup

1. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam
 - a. Implementasi pada 2 DAS dan pemantapan pada beberapa DAS yang sudah dilaksanakan
2. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan penanganan pencemaran sumberdaya alam (perdesaan dan perkotaan)
 - a. Peningkatan jumlah kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan nagari yang melaksanakan agroforestri serta pemantapan pengelolaan pada kawasan yang sudah dilaksanakan sebelumnya
3. Pengembangan hutan rakyat tanaman industri
 - a. Peningkatan jumlah nagari yang dapat melaksanakan hutan rakyat tanaman industri (dimana kondisinya sesuai) dan pemantapan pengelolaan pada nagari-nagari yang sudah dilaksanakan sebelumnya
4. Pengembangan kerangka peraturan untuk mendukung implmentasi
 - a. Pengembangan kerangka aturan sebagai landasan implementasi pada kegiatan prioritas pada RPJMD ke 3 (mana yang masih diperlukan)
- E. Pembangunan Sosial dan Sumberdaya Manusia
 1. Tercapainya Kualitas Pendidikan Yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama
 - a. Mengupayakan pencapaian mutu sekolah bertaraf internasional
 - b. Menyiapkan masyarakat untuk sistem pendidikan internasional
 - c. Sekolah Kejuruan menghasilkan
 - d. Pemantapan 12 Sekolah berasrama dan 2 Standar Internasional
 2. Terdapatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Yang Tinggi
 - a. Konsolidasi manajemen pelayanan kesehatan Dasar
 - b. Konsolidasi dan persiapan fokus Rumah sakit per daerah siap serta informasi dan pemetaan keperluan tenaga medis dan manajemen kesehatan
 3. Tercapainya Kemampuan IPTEKS Yang Maju dan Tepat Guna
 - a. Melanjutkan pembangunan Sains-Park
 - b. Implementasi IPTEKS
 - c. Meningkatkan manajemen pengelolaan Sains Park
- F. Pembangunan Tata ruang dan Lingkungan Hidup
 1. Terlaksananya Panataan Ruang Yang Baik dan Dilaksanakan Secara Konsekuen
 - a. Semakin mantapnya penataan ruang wilayah
 - b. Terlaksananya revisi terhadap RTRW yang telah berjalan separoh waktu.

	<p>2. Terdapatnya Perlindungan Terhadap Kawasan Konsevasi Alam</p> <p>a. Terdapatnya pengembangan flora dan fauna dalam Kawasan Konservasi</p> <p>b. Meningkatnya populasi tanaman langka</p> <p>3. Terlaksananya Tata Kelola Lingkungan Yang Baik</p> <p>a. Terlaksananya pengawasan ketat terhadap pence-maran air dan udara oleh industri</p> <p>b. Terdapatnya pengawasan penggunaan lahan kritis</p> <p>4. Terbinanya Masyarakat Sadar Lingkungan</p> <p>a. Terlaksananya pendidikan dan penyuluhan sadar lingkungan</p> <p>b. Lengkapnya sistem tanggap darurat dengan peralatan yang lebih maju</p>
Uraian Pencapaian	<p>: 1. Rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 “Meningkatkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. yang diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja adalah 90,68% dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut :</p> <p>a. meningkatnya kerukunan antar umat beragama yang diukur menggunakan indeks kerkunan sebagaimana ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 73,4 dapat terealisasi sebesar 67,87 dengan persentase capaian kinerja sebesar 92,47%</p> <p>b. meingkatnya pelestarian nilai-nilai budaya yang diukur dengan banyaknya jumlah warisan budaya yang ditetapkan secara nasional, dari target yang ditetapkan sebanyak 63 dapat terealisasi sebesar 56 dengan persentase capaian kinerja sebesar 88,89%</p> <p>2. Capaian indikator kinerja misi 2 “Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional“ dengan indikator kinerja tujuan adalah indeks reformasi birokrasi dapat dicapai pada angka 66,87 dari target 67,5 dengan pencapaian kinerja tujuan sebesar 99,07%. Rata-rata capaian tujuan tersebut diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja dengan capaian sebesar 94,35% dan termasuk kategori keberhasilan sangat baik dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan yang realisasinya sesuai dengan target yang diharapkan yaitu predikat WTP dengan persentase capaian kinerja 100% - Nilai Evaluasi SAKIP dari target BB dengan nilai 76,50 tercapai BB dengan nilai 76,16 dengan persentase capaian kinerja 99,56% <p>b. Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien, dengan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Profesionalitas ASN dari target 3,1 tercapai 2,69 dengan persentase capaian kinerja 86,77%

- Indeks e-Government dari target 71 tercapai 49,31 dengan persentase capaian kinerja 69,45%
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator : Rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik dari target 84 tercapai 88,33 poin dengan persentase capaian kinerja 105,25%
- 3. Capaian indikator kinerja misi 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi” dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia dapat dicapai pada angka 72,66 dari target 72,56 dengan pencapaian kinerja tujuan sebesar 100,01%. Rata-rata capaian tujuan tersebut diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja adalah 100,01% dan termasuk kategori keberhasilan memuaskan dapat dilihat pada keterangan berikut :
- a. Meningkatnya tingkat Pendidikan Masyarakat, dengan indikator :
 - Harapan lama Sekolah dari target 14,04 tercapai 14,09 dengan persentase capaian kinerja 100,36%
 - Rata-rata lama sekolah dari target 9,09 tercapai 9,07 dengan persentase capaian kinerja 99,78%
- b. Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator Angka Harapan Hidup yang ditargetkan 69,62 dapat tercapai 69,59 dengan persentase capaian kinerja 99,96%
- 4. Rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 “Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah” dengan capaian indikator kinerja tujuan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 95,64% (target 3,44 dan realisasi 3,29) dan Indeks Gini sebesar 99,67% (target 0,299 dan realisasi 0,3). Rata-rata capaian tujuan tersebut diukur yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja adalah 126,56%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan dapat dilihat pada keterangan berikut :
- a. Meningkatnya pendapatan Masyarakat, dengan indikator : Jumlah Pendapatan perkapita (Rp.Juta) dari target 46,09 tercapai 45,29 dengan persentase capaian kinerja 98,26 %
- b. Meningkatnya Pertumbuhan investasi, dengan indikator : Persentase pertumbuhan investasi dari target 1393,13 tercapai 3066,93 dengan persentase capaian kinerja 220,15 %
- c. Meningkatnya Nilai Ekspor, dengan indikator : Nilai Ekspor (US\$ Juta) target 6 tercapai 5,02 dengan persentase capaian kinerja 83,67 %
- d. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan indikator :
 - Tingkat Kemiskinan dari target 6,4 tercapai 6,04 dengan persentase capaian kinerja 105,63 %
 - Tingkat Pengangguran dari target 6,7 tercapai 6,52 dengan persentase capaian kinerja 102,69%
- 5. Rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 “Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.” dengan capaian indikator kinerja tujuan Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi

	<p>dengan kondisi jalan mantap sebesar 105,00 % (target 40 dan realisasi 42) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 100,87% (target 80,05 dan realisasi 80,75). Rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja adalah 100,79%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan. dapat dilihat pada keterangan berikut :</p> <p>a. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah, dengan indikator : Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap dari target 40 tercapai 42 dengan persentase capaian kinerja 105 %</p> <p>b. Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan, dengan indikator : Rasio Elektrifikasi dari target 99,30 tercapai 99,91 dengan persentase capaian kinerja 100,61 %</p> <p>c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air, dengan indikator : Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur dari target 61,94 tercapai 64,93 dengan persentase capaian kinerja 104,82 %</p> <p>d. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat, dengan indikator : Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat dari target 54,68 tercapai 55,37 dengan persentase capaian kinerja 101,26 %</p> <p>e. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara, dengan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none">- Indeks Kualitas Air dari target 76,8 tercapai 79 dengan persentase capaian kinerja 102,86 %- Indeks Kualitas Udara dari target 90,39 tercapai 90,22 dengan persentase capaian kinerja 99,81 % <p>f. Meningkatnya kualitas hutan dan lahan, dengan indikator : Indeks Tutupan Hutan dari target 66,3 tercapai 66,24 dengan persentase capaian kinerja 99,91%</p> <p>g. Menurunnya risiko bencana, dengan indikator : Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana dari target 75 tercapai 71,03 dengan persentase capaian kinerja 94,71 %</p>
Periode Perencanaan :	2021 - 2025
Arah Kebijakan :	<p>A. Pembangunan Agama dan Budaya</p> <p>I. Terlaksananya Tata kehidupan Masyarakat Yang Agamais dan Budaya</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya2. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan <p>II. Berkembangnya Sumatera Barat Sebagai Pusat Pendidikan Yang Islami</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya pola pendidikan dengan pengemblengan agama intensif secara menyeluruh2. Terwujudnya kualitas manajemen sekolah bernuansa Islam

III. Terwujudnya Kesalehan Sosial Berserta Kelembagaannya

1. Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak dan wakaf secara profesional
2. Semakin mantapnya pelaksanaan Sistem Ekonomi Islam.

IV. Terlaksananya pemanfaatan yang berlandaskan sistem yang telah diatur dalam PerdaTanah Ulayat

1. Terlaksananya advokasi hukum atas persengketaan tanah ulayat jika tidak ditemukan kompromi secara kekeluargaan.
2. Terwujudnya pengelolaan tanah ulayat dengan kepastian hukum.

V. Terciptanya Kehidupan Sosial yang Harmonis dalam suasana Multikultur

1. Terwujudnya kerukunan sosial multukultur
2. Terwujudnya komunikasi intensif antar etnis

B. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

I. Terbangunnya Sinergitas Antara pelaku Pembangunan

1. Terwujudnya sinergitas antara pelaku pembangunan daerah
2. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD serta kabupaten dan kota

II. Terwujudnya tata pemerintahan Yang Baik, Partisipatif, transparan dan Akuntabel

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel
2. Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi
3. Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan

III. Mewujudkan Penegakan Hukum yang berkeadilan dan Demokratis

1. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis
2. Pemantapan penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat
3. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat

IV. Mewujudkan aparatur yang Bersih dan Berwibawa

1. Tertatanya manajemen kepegawaian yang profesional
2. Terdapatnya aparatur yang handal dan bertanggung jawab
3. Terlaksananya suatu sistem birokrasi yang berorientasi prestasi dan nonpaternalistik
4. Akuntabilitas dan kredibilitas data untuk internal dan penelitian

C. Pembangunan Ekonomi

I. Terlaksananya Usaha Pertanian Modern dan Agribisnis Maju

- a. Diterapkannya teknologi pertanian rakyat tepat guna pada 250 nagari/desa dengan didukung oleh BATP sehingga tercapainya usaha pertanian rakyat modern
- b. Meningkatnya pengembangan kawasan yang terintegrasi
- c. Terbangunnya 250 KSP, 95 KIMBUN dan pemantapan KAPET dan Agrocitry yang susah ada dan pembangunan baru dimana layak

II. Termanfaatkannya potensi pertumbuhan ekonomi dari subsektor perikanan laut

- a. Termantapkannya regulasi usaha dan bertambahnya perusahaan yang aktif dalam usaha penangkapan dan budidaya perikanan
- b. Meningkatnya hasil tangkapan dan budidaya perikanan

III. Tercapainya Kegiatan Perdagangan dan Jasa yang Mampu Bersaing

- a. Terlaksananya usaha perdagangan dan jasa yang mampu bersaing di dunia global

IV. Terlaksananya Sumatera Barat Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional dan Internasional

- a. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah Tujuan utama wisata

V. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang Pantai Barat Sumatera

- a. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang

	<p>Pantai Barat Sumatera</p> <p>D. Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup</p> <p>I. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam</p> <p>II. Perlindungan dan Konservasi sumberdaya alam dan penanganan pencemaran sumberdaya alam (perdesaan dan perkotaan)</p>
Uraian Pencapaian	<p>: Pencapaian hasil pelaksanaan rencana dalam periode Tahun 2021 - 2025 ini adalah :</p> <p>A. PEMBANGUNAN AGAMA DAN BUDAYA</p> <p>1. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya</p> <p>Perwujudan tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya dapat ditunjukkan dengan beberapa data sebagai berikut :</p> <p>a. Jumlah penduduk menurut agama yang dianut pada tahun 2022 sebesar 5.528.423 orang, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 5.446.607 orang, akan tetapi jika dilihat dari jumlah jemaah haji mengalami penurunan pada tahun 2022 sebanyak 2.114 orang, dibandingkan tahun 2019 sebanyak 4.992 orang, sementara pada tahun 2020 dan 2021 karena covid 19, maka tidak ada penduduk Sumatera Barat yang melakukan ibadah haji dari Provinsi Sumatera Barat pada dua tahun tersebut.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama se Provinsi Sumatera Barat menjadi sebanyak 8.967 kasus, dengan penyebab terbesar disebabkan oleh faktor meninggalkan lah satu pihak sejumlah 754 kasus, diikuti oleh faktor ekonomi sejumlah 224 kasus, serta kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 33 kasus. Sementara jumlah cerai talak dan cerai gugat pada pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Sumatera Barat, masing-masing berjumlah sebanyak 2.213 kasus dan 6.714 kasus, meningkat dari 2.177 kasus dan 6.209 kasus pada tahun 2020. Dari kedua data di atas terlihat bahwa upaya untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang agamais dan berbudaya belum menunjukkan perkembangan cukup baik, karena masyarakat yang berbudaya dimulai dari kehidupan rumah tangga, dimana angka perceraian, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga masih perlu menjadi perhatian serius ke depannya.</p> <p>2. Semakin meningkatnya kualitas sarana peribadatan</p> <p>Sampai tahun 2022, pencapaian peningkatan kualitas sarana peribadatan terlihat dari makin banyaknya masjid-masjid</p>

yang menjadi wisata religi di Provinsi Sumatera Barat, seperti masjid Raya Sumbar, Masjid Al Hakim di KOTA Padang, Masjid Samudra Ilahi di Painan, Masjid Raya Bayur, serta berbagai Islamic Centre yang di bangun di Kabupaten/Kota. Jumlah sarana ibadah, pada tahun 2022 seperti masjid berjumlah 5.312 unit, mushalla 12.198 unit, bertambah sebanyak 94 unit masjid dan 257 unit mushalla dibandingkan periode 2016 - 2020

Hal ini menunjukkan bahwa sarana peribadatan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan beragama, seiring diikutinya mulai tumbuhnya wisata religi ke Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa mulai berkualitasnya sarana peribadatan di Provinsi Sumatera Barat, namun belum merata di Kabupaten/Kota dan belum dapat dipetakan dengan baik.

3. Terwujudnya pola pendidikan dengan penggemblengan agama intensif secara menyeluruh

Dapat ditunjukkan dengan Jumlah Pondok Pesantren pada tahun 2022 berjumlah 335 buah pesantren, meningkat sebesar 121 unit dibandingkan dengan periode 2016 - 2020, sementara jumlah santri pondok pesantren pada tahun 2022 berjumlah 70.054 orang santri, mengalami peningkatan sebanyak 38.018 santri dibandingkan periode 2016 - 2020. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pondok pesantren sebagai pola pendidikan dengan penggemblengan agama secara intensif makin berkembang dilihat dari jumlah pondok pesantren dan jumlah santrinya yang makin bertambah.

4. Terwujudnya kualitas manajemen sekolah bernuansa islami

Hal ini dapat ditunjukkan dengan tetap dan terpeliharanya sekolah menengah boarding yang menerapkan manajemen sekolah bernuansa islami, seperti SMAN 1 Sumbar, SMAN 2 Sumbar, SMANSA Padang Panjang, dengan metode boarding school serta berkembangnya penerimaan siswa baru melalui jalur tahfidz

5. Terwujudnya pengelolaan dana zakat, infak dan wakaf secara profesional

Jumlah zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat pada tahun 2022 sebesar Rp.130.614,42 juta rupiah, dengan rincian zakat maal sebesar Rp. 129.905,09 juta rupiah dan zakat fitrah sebesar Rp. 709,33 juta rupiah, menurun sebesar 20.864,34 juta rupiah dibandingkan dengan akhir periode 2016 - 2020 sebesar Rp. 151.478,76 juta rupiah. Dari Semakin mantapnya pelaksanaan sistem ekonomi islam

7. Terlaksananya advokasi hukum atas persengketaan tanah ulayat jika tidak ditemukan kompromi secara kekeluargaan

8. Terwujudnya pengelolaan tanah ulayat dengan kepastian hukum

Pemanfaatan tanah ulayat sudah memiliki kepastian hukum pada tahun 2008, terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Pemanfaatannya yang telah berlaku tanggal 1 Juli 2008

9. Terwujudnya kerukunan sosial multikultur

10. Terwujudnya komunikasi intensif antar etnis

B. PEMBANGUNAN HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Pencapaian dari arah kebijakan Pembangunan Hukum dan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan dengan beberapa data capaian yaitu :

1. Terwujudnya Sinergitas antar pelaku pembangunan

2. Terwujudnya sinergi pembangunan antar SKPD serta kabupaten dan kota

Sinergitas antar pelaku pembangunan dan sinergi serta sinergi pembangunan antar SKPD keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dan nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah yang mencapai

3. Terwujudnya tata pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Tata pemerintahan yang akuntabel, salah satunya ditunjukkan oleh opini Laporan keuangan, yang sampai tahun 2022 Wajar Tanpa Pengecualian, sama dengan capaian periode sebelumnya

4. Memantapkan penerapan Teknologi Informasi dalam sistem birokrasi

Penerapan teknologi Informasi dalam sistem birokrasi ditunjukkan oleh Indeks SPBE tahun 2022 sudah mencapai 3,2, hal ini menunjukkan bahwa capaian penerapan

5. Memantapkan peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan

6. Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan demokratis

7. Pemantapan penguatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa adat

8. Pembangunan kesadaran hukum masyarakat

Pembangunan kesadaran hukum masyarakat dapat ditunjukkan dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas produk hukum daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum.

9. Tertatanya manajemen kepegawaian yang profesional

Manajemen kepegawaian yang profesional dapat dilihat dari rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat serta paratur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persyaratan jabatan sebesar

10. Terdapatnya aparatur yang handal dan bertanggungjawab

Aparatur yang handal dan bertanggungjawab ditunjukkan oleh Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022 mencapai angka 74 point, ini menunjukkan bahwa

11. Terlaksananya suatu sistem birokrasi yang berorientasi prestasi dan nonpaternalistik

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan tahun 2022 85

12. Akuntabilitas dan kredibilitas data untuk internal dan penelitian

2. Nilai Evaluasi SAKIP tahun 2022 BB (78)

3. Nilai EPPD tahun 2022 3,0010

C. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pencapaian dari arah kebijakan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan dengan beberapa data capaian yaitu :

I. Terlaksananya Usaha Pertanian Modern dan Agribisnis Maju

- a. Diterapkannya teknologi pertanian rakyat tepat guna pada 250 nagari/desa dengan didukung oleh BATP sehingga tercapainya usaha pertanian rakyat modern
 - b. Meningkatnya pengembangan kawasan yang terintegrasi
 - c. Terbangunnya 250 KSP, 95 KIMBUN dan pemantapan KAPET dan Agrocitry yang sudah ada dan pembangunan baru dimana layak
- ditunjukkan dengan kontribusi sub sektor pertanian dan pertumbuhan sub sektor pertanian sebesar , hal ini menunjukkan bahwa

II. Termanfaatkannya potensi pertumbuhan ekonomi dari subsektor dapat dilihat meningkatnya Nilai Tukar Nelayan yang meningkat laut serta peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dan pendapatan nelayan

- a. Termantapkannya regulasi usaha dan bertambahnya perusahaan yang aktif dalam usaha penangkapan dan budidaya perikanan

- b. Meningkatnya hasil tangkapan dan budidaya perikanan

dapat dilihat meningkatnya Nilai Tukar Nelayan yang meningkat

III. Tercapainya Kegiatan Perdagangan dan Jasa yang Mampu Bersaing

- a. Terlaksananya usaha perdagangan dan jasa yang mampu bersaing di dunia global, dapat ditunjukkan oleh Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar (%), serta Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan, hal ini

IV. Terlaksananya Sumatera Barat Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan Wisata Nasional dan Internasional

- a. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah Tujuan utama wisata

V. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang Pantai Barat Sumatera

- a. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang Pantai Barat Sumatera
- 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)
- 3. Laju Pertumbuhan sektor perdagangan
- 4. Jumlah sentra industri kecil dan menengah

5. Laju Pertumbuhan sub sektor Koperasi
6. Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil
7. Jumlah enterpreneur baru tercipta
8. Persentase pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
9. Peresentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)
10. Jumlah enterpreneur baru tercipta

Pencapaian dari arah kebijakan Pembangunan Agama dan Budaya di Provinsi Sumatera Barat ditunjukkan dengan beberapa data capaian yaitu :

- I. 1. Indeks Pembangunan Kebudayaan tahun 2022 52,71
2. Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2022 58,13
3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2022 14,14
4. Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2022 56,12
5. Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 94,34
6. Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2022 65,12
7. Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2022 61,98